

Title : **PARADIGMA KOMUNIKASI PEMBANGUNAN
(Studi Pembangunan Pada Masyarakat Agraris di Sambas)**

Author : **BOB ANDRIAN**

Institution : IAIN Pontianak, Indonesia

Email : bob_andrian@iainptk.ac.id

Abstract : *Equitable development and a high level of prosperity is the hope of all parties, especially for the government, the community, or entrepreneurs. So that efforts to improve and develop the community will continue. However, after several attempts have been made, the value is still not optimal. This, of course, raises questions, what are the causes. To answer that, many issues must be resolved by the parties concerned in improving the development and welfare of the community. Some of the problems include the lack of optimal community participation in supporting the government's efforts to improve community welfare. In addition, the fundamental problem is also the inaccuracy of the implementation of development strategies used by the government itself. Theoretically, the initial development of the strategy adopted to develop society is an approach oriented to commercial aspects, such as Modernization, Independence and the World Economic System. Furthermore developed into a theory of diffusion and innovation that focuses on aspects of changing social systems in society. Considering the development of a society that is always dynamic with the development of times and civilization, the strategies and approaches chosen by the government should also develop. So that a new paradigm in development communication emerges which gives birth to a new theory, known as cybernetics. This theory is a theory that focuses on aspects of community involvement and participation as a communicant and communicator of development. The principle is to foster a high sense of community participation through several stages, namely; stimulation of interest, initiation, legitimation, decision to act, and action.*

Keywords : *Komunikasi, Pembangunan, Masyarakat Agraris.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas. Terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah wilayah yang subur dengan lahan yang terhampar luas, dan hutan-hutan yang lebat. Menurut hasil riset dunia, Indonesia ialah negara yang memiliki kontribusi besar bagi dunia yaitu salah satunya kontribusi dalam penyediaan oksigen. Penduduk Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang tinggal dan bermukim di daerah agraria. Sebagian besar masyarakatnya juga bekerja dalam sektor pertanian, tanaman pangan, peternakan, perkebunan, dan sektor lainnya.

Menurut data dari Badan Statistik Ketenagakerjaan dalam bidang Pertanian tahun 2019 (BPS Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, 2019: 37) mempresentasikan bahwa sekitar 31 – 36 %, yaitu sekitar 31,84 - 37,18 Juta Jiwa masyarakat Indonesia adalah pekerja yang bekerja utamanya sebagai petani, baik itu dilakukan dengan sendiri, buruh atau karyawan, pekerjaan bebas, berusaha di bantu buruh tetap, berusaha di bantu buruh tetap dan pekerja keluarga, dan sebagian besarnya adalah masyarakat yang berada di pedesaan. Statistik masyarakat yang bekerja dalam beberapa bidang, seperti pada sektor tanaman pangan sekitar 12.64 Juta Jiwa, pada sektor perkebunan 11.4 Juta Jiwa, pada sektor peternakan 4.45 Juta Jiwa dan pada sub sektor

hortikultura sekitar 3.28 Juta Jiwa.

Persentase dari data di atas, menunjukkan bahwa Indonesia secara keseluruhan memiliki potensi yang tinggi dalam memberikan kesediaan pangan bagi penduduknya, karena dilihat dari luas wilayah, kesuburan tanah serta ketersediaan sumber daya manusianya Indonesia sudah cukup memadai. Termasuk di daerah-daerah yang ada di Indonesia baik itu bagian timur maupun bagian barat. Khususnya daerah yang ada di bagian barat hampir merata memiliki kekayaan alam tersebut, di antaranya adalah daerah Provinsi Kalimantan Barat yaitu sekitar 264.713 Juta Jiwa yang pekerjaan utamanya ialah sebagai Petani.

Menurut data dari analisis sosial ekonomi petani yang dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Barat, menyatakan bahwa penghasilan petani pada sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Adapun hasil survey pendapatan petani di lapangan terakhir pada tahun 2019 membuktikan bahwa dari sekian banyak Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan barat sendiri memperoleh kenaikan angka produksi padi dari 2018-2019, yaitu berkisar dari angka 518.061-847.875 Ton/GKG. A

Adapun kabupaten yang memperoleh tingkat produksi terbanyak ialah Kabupaten Sambas, yaitu berkisar dari angka 118.584-168.632 Ton/GKG (Hasil Survey, BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2020: 317). Sambas adalah salah satu Kabupaten yang memiliki daerah yang subur dengan lahan yang luas, serta memiliki potensi sumber daya alam lainnya yang banyak, seperti perikanan, peternakan, dan terutama lahan agraris yang cukup memadai. Selain itu, Sambas juga memiliki potensi sumber daya manusia yang tidak jauh kalah dengan daerah-daerah lainnya.

Asumsi dasar dari data di atas, kekayaan alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Sambas seharusnya menjadi daerah penyedia lapangan pekerjaan untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Bahkan menjadi pemasok terbesar dalam sektor pertanian khususnya bagi masyarakat Kabupaten Sambas. Namun fakta di lapangan membuktikan, bahwa persentasi produktifitas belum sebanding dengan luas lahan yang ada. Menurut data, persentasinya masih jauh di bawah rata-rata, yaitu berkisar 24.95 % tingkat produktifitasnya. Serta menurut data (BPS Prov. Kalbar tahun 2020: 297) tingkat kemiskinan di Kabupaten Sambas mencapai 8.19% berada di atas tingkat kemiskinan ke-7 di Kalimantan Barat. Selain itu, tidak sedikit Masyarakat Sambas yang bekerja diluar negeri untuk mencukupi keperluan hidupnya, seperti ke Malaysia, Brunei dan negara-negara lainnya.

Fakta di atas, tentunya menimbulkan sebuah problematika dan pertanyaan besar bagi semua pihak, terutama pemerintah. Apabila daerah dengan kekayaan alam melimpah dan sumber daya lainnya yang memadai justru terkesan belum optimal pemberdayaan sumber alamnya. Lahir berbagai macam pertanyaan besar, seperti apakah program pemerintah yang kurang tepat atau mentalitas masyarakatnya yang belum berkembang misalnya. Ataukah ada hal lain yang justru kurang menjadi perhatian bagi semua pihak terutama pemerintah daerah selaku pemegang kebijakan daerah. Oleh sebab itu, untuk menjawab persoalan tersebut perlu adanya sebuah upaya yang relevan dengan kondisi sosial dan lingkungan dalam membangun masyarakat, khususnya masyarakat agraris Kabupaten Sambas. Adapun dalam konteks Ilmu Komunikasi upaya pembangunan yang relevan sekarang ini menawarkan sebuah paradigma baru. Implementasi paradigma tersebut di harapkan menjadi upaya pemerintah untuk menstimulus masyarakat agar meningkatkan taraf hidupnya.

PEMBAHASAN

Masyarakat Agraris

Masyarakat pada umumnya adalah berkumpulnya orang-orang dalam suatu lingkungan yang diikat oleh kesamaan identitas, ras atau adat istiadat, serta kesamaan kepentingan di dalamnya. Masyarakat pada dasarnya berbeda dengan komunitas atau kelompok, karena secara definisi komunitas adalah bagian dari pada masyarakat itu sendiri. Namun, terkadang sangat sulit dibedakan antara masyarakat dan komunitas. Menurut pandangan para pengkaji sosial kebudayaan seperti Sulasman dan Setia Gumilar (2013: 29) menyebutkan bahwa perbedaan antara masyarakat dan komunitas adalah terletak pada wilayahnya. Wilayah dalam artian masyarakat ini adalah wilayah dimana interaksi atau hubungan yang dilakukan oleh anggota masyarakat memiliki ruang lingkup lebih luas dibandingkan dengan komunitas.

Sulasman dan Setia Gumilar (2013: 29), lebih lanjut menjelaskan bahwa suatu masyarakat, kelompok dan bahkan komunitas bisa disebut sebagai masyarakat apabila memiliki empat faktor yang mengikat, yaitu *Pertama*, terbangunnya sebuah interaksi yang terjadi antara anggota masyarakat. Interaksi yang dimaksudkan adalah interaksi sosial dalam artian secara umum, baik itu secara verbal maupun nonverbal, individu maupun kelompok dan bentuk-bentuk komunikasi lainnya. *Kedua*, adanya norma-norma dalam wujud adat istiadat. Faktor kedua ini adalah faktor yang menjadi sebuah sistem pengikat dan berfungsi sebagai pengatur dalam setiap gerak gerik dan tingkah laku setiap anggota masyarakat. Tujuannya adalah agar setiap anggota masyarakat tidak menyimpang dan menyalahi dari norma atau aturan yang telah dibangun oleh masyarakat itu sendiri, sehingga kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan damai dan sejahtera sebagaimana yang diharapkan. *Ketiga*, berkesinambungan. Maksudnya ditinjau dari waktu berlangsungnya, interaksi yang terbangun menjadi norma di masyarakat dan terus berlangsung dalam waktu lama. *Keempat*, adalah faktor rasa kesamaan identitas yang kuat. Faktor ini diartikan dengan kesamaan ras, suku atau etnis, kesamaan keyakinan agama, status sosial ekonomi, dan bahkan kesamaan identitas nasionalisme.

Terkait dengan empat faktor pengikat di atas, tatanan kehidupan sosial masyarakat dapat di kelompokkan menjadi beberapa bentuk. Secara umum pengelompokan tersebut dapat dilihat dari proses perubahan yang terjadi sejak masa lalu sampai sekarang ini. Menurut Alvin Toffler (Jemsly dan Martani, 2006: 45) menyebutkan bahwa bentuk perubahan yang terjadi di masyarakat dunia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu masyarakat agraris, masyarakat Industri dan masyarakat informasi. Alvin Toffler menambahkan bahwa bentuk-bentuk masyarakat dunia tersebut memiliki perbedaan yang sesuai dengan ciri dan karakteristiknya masing-masing. Ciri dan karakteristik tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya dilihat dari sumber daya yang menjadi bahan pokok pengelolaannya, masyarakat agraris bahan pokoknya adalah tanah. Adapun masyarakat industri bahan pokoknya adalah modal kerja, yaitu terdiri modal keuangan, modal sumber daya manusia dan modal sumber daya alamnya. Sedangkan masyarakat informasi bahan yang menjadi pokok pengelolaannya adalah informasi itu sendiri, yaitu informasi melalui berbagai media yang marak sekarang ini, baik itu media cetak, elektronik, maupun internet.

Berkaitan dengan waktu, pandangan terhadap ketiga bentuk masyarakat tersebut juga memiliki perbedaan. Di antaranya masyarakat agraris cenderung dipandang sebagai masyarakat masa lalu, karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh masyarakat. Kemudian masyarakat industri diidentikan dengan masyarakat sekarang ini, karena perkembangan teknologi yang semakin pesat di berbagai bidang, terutama di bidang industri.

Sedangkan masyarakat informasi digambarkan sebagai masa mendatang, karena kecanggihan dan kecepatan proses transaksi informasi yang terjadi di masyarakat terus berlangsung dalam waktu yang cukup lama ke depan. Perbedaan berikutnya adalah terkait dengan transformasi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat tersebut. Di antaranya, masyarakat agraris dalam penggunaan sumber dayanya masih sangat tradisional yaitu dengan tenaga fisik. Kemudian masyarakat industri lebih pada penggunaan tenaga mesin dalam pemrosesannya. Sedangkan masyarakat informasi, faktor penting dalam proses transformasi sumber dayanya adalah cenderung menggunakan intelegensia yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat di pahami bahwa konsep dasar dari masyarakat khususnya masyarakat agraris merupakan sekumpulan orang yang berada dalam lingkungan tertentu dan diikat oleh faktor-faktor pengikat, sehingga menjadi sebuah ciri khas dan karakter tersendiri dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Ciri dan karakter dari konsep masyarakat agraris dalam hal ini adalah masyarakat yang banyak hidup dari lingkungan alam (Tanah). Ciri lainnya adalah memiliki keterbatasan dalam beberapa bidang, seperti cara pengolahan alam yang masih sangat tradisional dan cenderung menggunakan energi fisik. Istilah lain dari masyarakat agraris yang dipahami oleh banyak kalangan akademisi sekarang ini, sering juga disebut dengan masyarakat pedesaan. Penyebutan dan pemahaman masyarakat tentang masyarakat pedesaan sebagai masyarakat agraris pada umumnya adalah dikarenakan hampir di semua wilayah Indonesia daerah-daerahnya memiliki ciri dan karakter yang sama dengan masyarakat agraris, termasuk di dalamnya masyarakat Kabupaten Sambas.

Merujuk pada ciri dan konsep dasar dari masyarakat agraris sebagaimana telah dijelaskan, bahwa secara umum masyarakat Kabupaten Sambas dikategorikan sebagai bagian dari masyarakat agraris. Hal itu adalah dikarenakan beberapa hal, yaitu antara lain: pertama dari sisi sumber daya yang menjadi bahan pokok Masyarakat Kabupaten Sambas pada umumnya adalah masyarakat yang hidup dan berkembang dari hasil mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam khususnya tanah. Fakta di lapangan membuktikan, sebagaimana yang di ambil dari hasil survey dan data terakhir yang ada di BPS Kalimantan Barat bahwa Kabupaten Sambas adalah daerah yang memiliki sumbangsih terbesar dalam bidang distribusi rumah tangga khususnya dalam bidang pertanian.

Kedua, dari sisi waktu yang menggambarkan bahwa kondisi masyarakat agraris di Kabupaten Sambas juga memiliki keterbatasan dalam ilmu dan teknologi dalam mengolah sumber daya alam. Keterbatasan tersebut bukan dikarenakan oleh tidak adanya alata atau mesin yang lebih canggih, namun faktor utamanya adalah mindset (pola pikir) masyarakat yang cenderung belum siap dengan perkembangan teknologi di era modern ini. Pada satu sisi keterbatasan tersebut bisa dipandang sebagai sebuah kelebihan, karena dengan media dan peralatan pertanian dan perkebunan yang sederhana digunakan lebih aman dan bersahabat dengan lingkungan, namun di sisi lain keterbatasan tersebut menjadi ciri dari masyarakat agraris di Kabupaten Sambas yang kendala dalam meningkatkan produktivitas masyarakat.

Ketiga, dari sisi transformasi sumber daya alamnya masyarakat Kabupaten Sambas secara umum juga masih sangat tradisonal, yaitu dalam proses pengelolaan lahan lebih mengandalkan tenaga fisik dibandingkan dengan tenaga mesin yang ada di masyarakat industri dan infromasi. Sebagai contoh, tradisi bercocok tanam padi yang masih sangat manual sekali baik itu dari pembibitannya sampai pada proses penggilingannya.

Hakikat Komunikasi Pembangunan

Perspektif ilmu komunikasi pembangunan bukanlah hal asing bagi kalangan akademika. Beriring perkembangan zaman dan majunya teknologi, fakta itu memberikan dampak pada perkembangan terhadap kajian ilmu komunikasi. Meskipun komunikasi pembangunan adalah produk kajian para ahli komunikasi pada masa lalu yang sempat redup dalam kajian ilmu komunikasi pembangunan. Namun beberapa dekade ini, di berbagai perguruan tinggi dan ruang-ruang yang memungkinkan untuk membahas tentang pembangunan, komunikasi pembangunan menjadi salah satu sentral penting untuk di kembangkan. Hal ini dikarenakan sumbangsih komunikasi pembangunan dalam memberikan kontribusi meningkatkan mutu dan kualitas hidup masyarakat sangatlah relevan.

Mengingat begitu pentingnya komunikasi dalam meningkatkan mutu dan kualitas hidup masyarakat, komunikasi pembangunan menjadi suatu hal yang menarik untuk di kembangkan. Komunikasi pembangunan secara terminologi merupakan kata yang terdiri dari komunikasi dan pembangunan. Kedua kata tersebut merupakan titik fokus dalam memahami pengertian dari komunikasi pembangunan tersebut.

Komunikasi secara umum dipahami oleh para ahli ilmu komunikasi adalah sebagai sebuah proses interaksi seseorang dengan lingkungannya yang bertujuan untuk menyampaikan dan menerima informasi sesuai dengan konteksnya. Menurut Stewart L. Tubs dan Sylvia Moss (2008: 15-16) paling tidak ada enam konteks komunikasi yaitu di antaranya komunikasi antara dua orang, wawancara, komunikasi kelompok kecil, komunikasi publik, komunikasi organisasi dan komunikasi massa. Sedangkan pembangunan lebih diidentikan dengan perubahan kepada arah yang lebih baik. Sebagaimana dikatakan oleh Everet M. Rogers yang (Mukhti Sitompul, 2002: 1) bahwa secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi sesuai dengan kehendak dari suatu bangsa.

Komunikasi dalam perspektif pembangunan menurut pandangan Dedy Mulyana (Sumadi Dilla, 2012: vii) ialah berkaitan erat dengan perubahan sosial. Hal ini terbukti sebagaimana yang diaplikasikan oleh negara-negara berkembang bahwa banyak perubahan-perubahan yang dilakukan berorientasi pada pembangunan sosial ekonomi masyarakat, seperti Malaysia, Filipina, Thailand dan negara berkembang lainnya. Adapun kaitannya dengan pembangunan dalam multi perspektif, komunikasi tidak terbatas pada konsep komunikasi yang bertujuan pada penyampaian dan penerimaan informasi. Melainkan komunikasi itu sangat luas cakupannya seperti komunikasi massa, komunikasi politik, komunikasi pendidikan, komunikasi antarbudaya dan bahkan pada komunikasi pembangunan pada bidang pertanian. Keragaman tersebutlah yang dikatakan oleh Dedy Mulyana bahwa komunikasi pembangunan adalah suatu konstruksi yang sifatnya cair sesuai dengan konteks bidang yang menjadi fokus kajiannya.

Pembangunan adalah sebuah perubahan kepada lebih baik yang menjadi harapan setiap orang. Terkait hal itu, dalam konteks khas ke-Indonesiaan komunikasi pembangunan memiliki pendefinisian tersendiri, sebagaimana dikatakan oleh Onong Effendy (1987: 92) bahwa, “Komunikasi pembangunan adalah proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah, yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat”. Mengacu pada definisi tersebut, dapat dipahami bahwa komunikasi pembangunan adalah komponen penting dalam upaya meningkatkan dan memajukan kesejahteraan masyarakat oleh pemerintah, dan tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial, politik dan bahkan *civil society* suatu bangsa.

Pandangan tersebut sejalan dengan konsep komunikasi pembangunan yang di usung oleh Lerner (Sumadi Dilla, 2012: 8) dalam studinya dengan tema *The Passing of Tradisional Society* yang mengkaji lebih luas tentang *Communication and Deploiment* (Komunikasi dan Pembangunan). Dilihat dari konsep dasar komunikasi pembangunan tersebut, paling tidak terdapat beberapa ideologi penting yang menjadi sentral dalam tujuan dan fungsi komunikasi pembangunan, di antaranya, *Pertama*, esensi dari pembangunan yang dilakukan adalah bertujuan untuk memaksimalkan ketersediaan barang dan jasa bagi masyarakat. *Kedua*, objek utama untuk membedakan anatara negara maju dan negara berkembang adalah dilihat dari aspek barang dan jasa. Hal ini tentunya diukur dari kualitas dan kuantitas barang dan jasa yang tersedia di masyarakat. Semakin tinggi kualitas maupun kuantitas barang dan jasa yang ada, maka akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. *Ketiga*, komunikasi pembangunan adalah cara cepat dan efektif yang bertujuan untuk membawa perubahan kesadaran masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui media komunikasi dengan membangun citra positif untuk memotivasi masyarakat. Tujuan motivasi itu adalah untuk melakukan perubahan mental lama kepada mental baru yang lebih baik, serta membangun rasa kebersamaan dalam meningkatkan mutu dan kualitas hidup masyarakat sejahtera.

Terlepas dari kritikan para pengkaji ilmu komunikasi yang fokus pada konsep komunikasi pembangunan. Inti ideologi dari konsep komunikasi pembangunan pada dasarnya adalah untuk menyediakan, mendorong, membangun tatanan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Sedangkan media komunikasinya adalah sebagai saran untuk meningkatkan pertumbuhan produk dan jasa di masyarakat. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa pada hakikatnya komunikasi pembangunan memiliki peran dan fungsi sebagai sebuah proses komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Bagi pihak pemerintah peran dan fungsi komunikasi pembangunan adalah sebagai penunjang dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian pembangunan. Sedangkan bagi masyarakat adalah sebagai sarana untuk memahami, menerima dan berpartisipasi dalam proses pembangunan guna terwujudnya kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat.

Paradigma Komunikasi Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat Agraris

Komunikasi dalam kajian disiplin keilmuan adalah ilmu terapan yang relatif baru dibanding disiplin ilmu-ilmu lainnya. Meskipun demikian, sejarah perkembangannya sudah ada sejak lama. Para ahli komunikasi sepakat bahwa dasar-dasar ilmu komunikasi itu berkembang sejak masa Yunani Kuno, yang diawali dari perkembangan retorika sekitar pada tahun 465 SM di Athena. Kemudian berkembang sebagai suatu ilmu yang menjadi fenomena dalam memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat ilmu komunikasi mulai dikenal dan dikembangkan oleh John Dewey dan Robert E. Park sekitar abad ke-20 an (Iswandi Syahputra, 2007: 3-6).

Ilmu komunikasi adalah disiplin ilmu yang sangat kompleks. Menurut Onong Uchjana Effendy (2003: 53) beberapa bidang ilmu komunikasi yang menjadi objek kajiannya, di antaranya dalam bidang sosial, organisasi atau manajemen, bisnis, politik, internasional, antar budaya, tradisional dan terakhir adalah komunikasi pembangunan. Dari beberapa bidang tersebut, beberapa dekade lalu komunikasi pembangunan pernah menjadi perhatian serius dalam kajian ilmu komunikasi, khususnya diluar negeri. Sedangkan di Indonesia sendiri beberapa waktu lalu sempat meredup dan bahkan jarang sekali terdengar di perguruan-perguruan tinggi khususnya jurusan komunikasi. Terlepas dari persoalan yang terjadi, sekarang ini sudah mulai muncul pengkaji-pengkaji ilmu komunikasi khususnya dalam bidang pembangunan. Tujuannya adalah

untuk mengembangkan disiplin ilmu komunikasi agar dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, sekarang ini ilmu komunikasi juga mengalami perkembangan, salah satunya dalam paradigma komunikasi pembangunan. Kaitannya dengan perubahan yang menjadi tujuan komunikasi pembangunan, paradigma adalah bagian penting yang mesti dipahami untuk mengetahui realita sosial di masyarakat. Paton (Sumadi Dilla, 2012: 56) menyatakan bahwa paradigma adalah “*A World View, a general perspective, a way of breaking down the complexity of the real world*”, yang artinya bahwa paradigma adalah konsep dasar dalam berfikir dan melihat realita sosial masyarakat, sehingga menjadi sebuah kekuatan untuk memahami setiap persoalan. Kemudian pada akhirnya kekuatan tersebut mampu untuk mempengaruhi masyarakat dalam menemukan metode dan solusi dari setiap persoalan.

Sejak masa awal sampai sekarang, paradigma yang berkembang dalam teori perubahan dapat dilihat dari berbagai aspek. Terkait dengan perubahan sosial ekonomi masyarakat, paradigma yang dikembangkan di negara-negara dunia banyak menggunakan tiga teori besar dalam pembangunan. Teori tersebut menurut Sumadi Dilla (2012: 63-76) di antaranya, *Pertama*, Teori modernisasi pada dasarnya mengusung untuk merubah konsep berfikir masyarakat dari tradisional menuju masyarakat berkembang dan masyarakat modern dalam aspek nilai, ekonomi, sosial, budaya dan ekonomi. Namun teori ini lebih cenderung pada peningkatan sumber daya manusianya saja.

Kedua, Teori ketergantungan adalah teori yang berasal dari konsep dasar teori Marxisme yang mengusung kepada negara-negara baru untuk berkembang melalui fasilitas yang disediakan oleh negara maju. *Ketiga*, Teori Sistem ekonomi dunia yang mengusung kepada pihak untuk membentuk sebuah sistem yang dapat menjalinkan hubungan dalam perekonomian, budaya, sosial, dan politik, sehingga menjadi sebuah kekuatan bagi pihak yang terlibat untuk berkembang. Ketiga teori tersebut pada dasarnya berorientasi pada kapitalisme yang sesuai situasi dan kondisi ekonomi masing-masing daerah untuk berkembang.

Menurut H. Rochajat dan Elvinaro dalam bukunya “*Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*” (H. Rochajat dan Elvinaro, 2011: i-ii) menyebutkan bahwa teori-teori di atas memiliki kelemahan, di antaranya; *Pertama*, dilihat dari orientasinya menggunakan pola *Top-Down* yang berpihak pada pemerintah. *Kedua*, model yang digunakan menggunakan konsep barat dengan mengacu pada konteks negara berkembang. *Ketiga*, konsep yang digunakan adalah konsep kekinian sehingga mengikis konsep kearifan lokal (*Local Genius*) masyarakat setempat.

Paradigma lainnya yang terkait dengan teori perubahan, termasuk di dalamnya adalah teori sosial kultural masyarakat. Menurut Sulasman dan Setia Gumilar (2013: 136), aspek ini hubungannya dengan perubahan ada dua paradigma yang dikembangkan, yaitu Evolusi dan Difusi. Konsep dasar paradigma evolusi memandang bahwa perubahan sosial yang terjadi di masyarakat adalah merupakan keniscayaan, sehingga apabila setiap perbuahan telah di kuasai maka akan mudah mengatasi setiap persoalan. Sedangkan paradigma difusi memandang bahwa kebudayaan yang ada di suatu daerah atau tempat tertentu dipengaruhi oleh lingkungan hidup, alam dan waktu dimana daerah tersebut berada.

Sesuai dengan konteks kekinian yang semakin kompleks dan luas, paradigma difusi dan inovasi dipandang tidak lagi relevan. Hal ini di akui oleh Rogers sendiri sebagai pencetus teori difusi dan inovasi. Dikutip oleh Hadyanto (2008: 80), Rogers menyatakan bahwa “Penampilan

yang mengecewakan dari paradigma yang dominan selama satu dasa warsa membawa kita untuk mempertimbangkan berbagai konsepsi alternatif mengenai komunikasi pembangunan”. Rogers (Sumadi Dilla, 2012: 82) berpendapat bahwa paradigma difusi dan inovasi ini hanya memusatkan pada titik pengembangan saja, tanpa harus memperhatikan aspek psikologis individual, tradisi dan budaya lokal, serta prestasi masyarakat setempat. Akibatnya menurut Rogers sangat fatal dan beresiko tinggi apabila setiap strategi yang digunakan.

Merujuk pada pandangan di atas, bahwa paradigma lama di nilai tidak lagi memberikan perubahan sesuai dengan yang diharapkan, baik itu bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh sebab itu, muncul paradigma baru komunikasi pembangunan yang dipandang relevan sebagai sarana untuk memfasilitasi proses peningkatan mutu dan kualitas hidup masyarakat. Paradigma baru itu adalah paradigma komunikasi Partisipatif. Menurut Bessette (Hadyanto, 2008: 84), konsep Partisipatif dalam komunikasi pembangunan adalah upaya yang dilakukan berdasarkan proses-proses Partisipatif masyarakat melalui beberapa sisi, di antaranya pemanfaatan media dan komunikasi tatap muka antara pemerintah dan masyarakat. Tujuannya adalah agar terbangunnya dialog antara pihak yang memiliki kepentingan berbeda, sehingga ditemukan rumusan masalah yang menjadi sasaran pembangunan serta memberikan solusi yang membangun.

Proses Partisipatif yang diusung oleh paradigma baru ini, dalam pandangan ilmu komunikasi pada esensinya adalah membangun kerjasama yang aktif antara unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur tersebut di antaranya pemerintah dan masyarakat sebagai komunikatornya sekaligus komunikannya, media sebagai alat atau sarana penyampaian pesan, dan ide atau program sebagai pesannya. Terkait dengan prinsip paradigma komunikasi pembangunan Partisipatif teori yang relevan dengan membangun kerjasama ini menurut Jemieson (Sumadi Dilla, 2012: 131) adalah teori Sibernetika (*Cybernetics*). Teori ini dalam penerapannya mengusung masyarakat untuk aktif secara Partisipatif. Menurut Roger konsep ini dipandang tepat, karena pendekatan yang digunakan adalah sebagai mekanisme untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai *agent of change* dalam membantu masyarakat itu sendiri dalam menyelesaikan persoalannya.

Prinsip partisipasi dalam komunikasi pembangunan bukan sebatas proses sekedar hadir, memberikan pendapat atau hanya berdasarkan persepsi pemerintah atau penyuluh sendiri. Sangat rasional, jika masyarakat belum mau terlibat dalam berbagai program pembangunan khususnya kegiatan penyuluhan karena sejak awal masyarakat tidak terlibat dalam menentukan kegiatan yang diprogramkan. Terkait dengan hal ini, menurut Roger proses sosial dan proses pengambilan keputusan dalam model adopsi dari teori-teori sebelumnya dapat dimodifikasi. Proses tersebut meliputi lima tahap (Donnermeyer, Joseph F., dkk, 1997: 65-83); *pertama*, stimulasi minat (stimulation of interest) yaitu inisiatif dalam komunitas mulai berkembang pada tahap awal dalam ide baru dan praktek. *Kedua*, inisiasi (initiation) yaitu kelompok yang besar mempertimbangkan ide baru atau praktek, dan alternatif dalam implementasi. *Ketiga*, legitimasi (legitimation) merupakan tahap saat pimpinan komunitas memutuskan akan meneruskan tindakan atau tidak. *Keempat*, keputusan bertindak adalah rencana spesifik tindakan mulai dibangun. *Kelima*, aksi yaitu penerapan rencana.

Adapaun penerapan kelima tahapan komunikasi tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat agraris khususnya, dapat dilakukan dengan beberapa beberapa strategi. Diantaranya, peihak pemerintah dalam hal ini Pemerintah daerah kabupaten sebaiknya memanfaatkan beberapa potensi penting yang dimiliki oleh daerah. Kemudian meningkatkan lagi potensi dasar SDM yang dimiliki, terutama pengetahuan masyarakat tentang

potensi yang ada lalu melalui pemerataan pendidikan, perbanyak intensitas pelatihan dan pengembangan skill kreativitas. Ketika sudah dilakukan, maka pemerintah memiliki peran besar untuk melegitimasi setiap hasil karya atau produksi dimasyarakat agar bisa sampai pada pasar. Setelah setiap hasil karya dan produksi masyarakat di akui dan layak di pasarkan, maka berikutnya ialah mendistribusikan ke jangkauan lebih luas, melalui sosiaolisasi dan promosi oleh pihak pemerintah kepada masyarakat luar daerah. Terakhir dari strategi yang diterapkan dalam paradigma baru komunikasi pembangunan di masyarakat agraris ialah, setiap perencanaan dengan menekankan pada potensi dan kelebihan yang dimiliki masyarakat harus menjadi prioritas pembangunan daerah khususnya, bahkan pada skala pembangunan nasional. Sehingga pada konteks ini, maka sinergilah antara peran pemerintah dengan partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan paparan tersebut, maka terdapat beberapa poin penting yang dapat dipahami bersama. Diantaranya, bahwa komunikasi pembangunan merupakan salah satu aspek penting untuk menunjang proses pengembangan masyarakat agraris. Hal tersebut dikarenakan bahwa, selama beberapa masa pembangunan dan pengembangan masyarakat, khususnya di sambas permewujudan kesejahteraan masyarakat di bidang pertanian masih dipandang belum maksimal. Selanjutnya, dengan adanya perkembangan berbagai disiplin keilmuan, komunikasi pembangunan juga mengalami perkembangan, diantaranya mulai adanya paradigma baru dalam komunikasi pembangunan, yaitu dari teori difusi-inovasi berkembang menjadi paradigma partisipatif atau dikenal dengan "*teorisibernetika*". Prinsip utama teori ini menekankan pada aspek kesadaran masyarakat akan pentingnya kerjasama dan keterlibatan semua pihak untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhannya. Adapun strategi yang dapat di implementasikan sebagai rumusan tersendiri dalam paradigma baru komunikasi untuk pembangunan di daerah agraris, yaitu, *stimulation of interest, initiation, legitimation*, keputusan bertindak dan penerapan rencana.

DAFTAR RUJUKAN

- Dilla, Sumadi. 2012. "*Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu*", Bandung: Simbiosis.
- Donnermeyer, Joseph F., dkk. 1997. "Community Readiness and Prevention Programs", *Journal of the Community Development Society*, 28(1): 65-83. doi.org/10.1080/15575339709489795
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. "*Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*", Bandung: Citra Aditiya Bakti.
- Effendy, Onong Uchjana. 1987. "*Komunikasi dan Modernisasi*", Bandung: Alumni,
- G Bessette. 2004. "*Involving the Community: A Guide to Participatory Development Communication. Southbound, Penang*", Malaysia, Kanada: IDRC.
- Gumilar, Setia dan Sulasman. 2013. "*Teori-Teori Kebudayaan dari Teori Hingga Aplikasi*", Bandung: Pustaka Setia.
- Hadyanto. 2008. Komunikasi Pembangunan Partisipatif; Sebuah Pengenalan Awal, *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 6(2): 80-88.

<https://www.neliti.com/publications/246359/komunikasi-pembangunan-partisipatif-sebuah-pengenalan-awal>

- Harun, H. Rochajat dan Elvinaro Ardianto. 2011. *“Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial; Perspektif Dominasi Kajian Ulang dan Teori Kritis”*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hutabarat, Jemsly dan Martani Husaini. 2006. *“Pengantar Manajemen Strategi Kontemporer Strategi di Tengah Operasional”*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sitompul, Mukhti. 2002. *“Konsep-konsep Komunikasi Pembangunan”*, Universitas Sumatera Utara: USU Digital Library Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Jurusan Ilmu Komunikasi. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/3778/?sequence=1>
- Tim Penyusun. 2014. *Pusat data dan Sistem Informasi Pertanian: Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian*, Statistik Ketenaga Kerjaan Sektor Pertanian. Diakses dari <http://pusdatin.setjen.pertanian.go.id/statistika-211-statistik-ketenagakerjaan-sektor-pertanian-tahun-2014.html>, pada tanggal 13 April 2016, pukul 23.00 WIB.
- Syahputra, Iswandi. 2007. *“Komunikasi Profetik; Konsep dan Pendekatan”*, Bandung: Simbiosis.
- Tim Penyusun. 2014. *“Analisis Sosial Ekonomi Petani di Kalimantan Barat; Hasil Survey pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Sensus Pertanian 2013”*, Pontianak: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat.
- <https://kalbar.bps.go.id/publication/2014/12/31/a5a3d75b3396e79740220539/analisis-sosial-ekonomi-petani-di-kalimantan-barat--hasil-survei-pendapatan-rumah-tangga-usaha-pertanian-sensus-pertanian-2013-.html>
- Tubs, Stewart L. dan Sylvia Moss. 2008. *“Human Communication; Prinsip-prinsip Dasar”*, Terj. Dedy Mulyana, Bandung: Remaja Rosdakarya.